

## **BAB I**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **A. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 - 2018 Provinsi NTB ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013 – 2018 dengan **Visi “ Mewujudkan Masyarakat NTB Yang Beriman , Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera”** dengan menjabarkan pada **Misinya** : 1) Mempercepat Perwujudan masyarakat berkarakter, 2) Mengembangkan Budaya dan Kearifan Lokal Untuk Pembangunan, 3) Melanjutkan Ikhtiar Reformasi Birokrasi Yang Bersih dan Melayani , Penegakan Hukum yang Berkeadilan, dan Memantapkan Stabilitas Keamanan, **4) Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia Yang Berdayasaing, 5) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Mempercepat Penurunan Kemiskinan, dan Mengembangkan Keunggulan Daerah,** 6) Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah Berbasis Tata Ruang, 7) Memantapkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.

Dari Ketujuh Misi Yang tertuang pada RPJMD tersebut Misi ke- 4 dan Misi Ke-5 merupakan misi yang harus ikut diemban oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi NTB dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bidang Ekonomi, karena masih ada penekanan-penekanan perhatian pemerintah pada kedua misi tersebut. Pada Misi ke-4 RPJMD Provinsi NTB tersebut masih diakui bahwa peran perempuan di pedesaan belum optimal sehingga dibutuhkan pemberdayaan perempuan di pedesaan khususnya dalam pemberdayaan ekonomi , begitu pula pada Misi ke-5 bahwa adanya ketimpangan struktur ekonomi daerah dari sektor pertanian ke sektor jasa ( belum berkembangnya sektor industri olahan), seiring dengan sektor jasa tersebut bahwa sektor produksi juga mendapat tantangan yang serius terutama dalam menghadapi pesaing luar daerah, bahkan luar negeri yaitu dalam rangka memasuki pasar bebas ASEAN pada Tahun 2015 juga ditengarai juga beberapa permasalahan yang ada yaitu rendahnya struktur permodalan UMKM dan mekanisme penyaluran modal yang belum tepat, rendahnya daya saing SDM serta adanya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tidak berimbang. Hal ini merupakan hal yang serius yang dihadapi oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, oleh karena Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Provinsi NTB tersebut menyelaraskannya kedalam Visi dan Misi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi NTB yaitu, **Visi : “Terwujudnya Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Saing”,** dengan **Misi Utama “Memberdayakan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai Pelaku Ekonomi yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Saing secara Global”.** dan menetapkannya ke dalam 6 misi, yaitu :

Misi 1

Mewujudkan Keterpaduan Program Dan Kegiatan Serta Ketatausahaan Pembinaan Dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Yang Berkualitas

Misi 2

Mendorong Pertumbuhan Dan Kemandirian Koperasi Sebagai Pelaku Ekonomi Yang Berkualitas , Mandiri Dan Berdaya Saing Secara Global

Misi 3

Mendorong Pertumbuhan UMKM Melalui Dukungan Pembiayaan Dan Permodalan, Pengembangan Akses Pasar, Promosi Dan Legalitas Formal UMKM , Serta Penciptaan Wirausaha Baru

Misi 4 :

Meningkatkan Kemampuan Koperasi Dan UMKM Melalui Fasilitasi Permodalan Dan Pembinaan Simpan Pinjam Sebagai Pelaku Ekonomi Yang Berkualitas , Mandiri Dan Berdaya Saing Secara Global

Misi 5 :

Meningkatkan Kesadaran Dan Kemauan Serta Pemahaman Masyarakat Dalam Mengembangkan Usahanya Melalui Koperasi Dan UMKM

Misi 6 :

Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas SDM Aparatur Dan Pengelola Koperasi

Dengan mis-misi tersebut diharapkan dapat memberdayakan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sehat kelembagaan dan usaha, memiliki kualitas pengelolaan, administrasi dan permodalan serta memiliki kemandirian yang berperan sebagai motor penggerak dalam perekonomian daerah maupun nasional.

Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat tumbuh dan berkembang, sehat, berkualitas dan mandiri sehingga mampu menciptakan lapangan usaha baru, meningkatkan kesempatan berusaha bagi masyarakat dan mampu menyerap tenaga kerja guna mengurangi pengangguran.

Visi dan Misi tersebut dijabarkan ke dalam Program prioritas diharapkan dapat memberikan daya ungkit bagi percepatan pencapaian sasaran pembangunan yang ditetapkan, khususnya dalam upaya meningkatkan posisi IPM-NTB khususnya di bidang kesejahteraan ekonomi melalui program peningkatan kualifikasi Koperasi berkualitas, Pembentukan KSP Syariah, meningkatnya kualifikasi usaha UMKM, Penumbuhan Wirausaha Baru serta Pembinaan Sentra agar dapat berkembang menjadi sentra unggulan.

Upaya pencapaian terhadap Visi dan Misi tersebut dengan tetap memperhatikan **isu-isu strategis** yang berkembang yaitu: **masih tingginya angka kemiskinan, masih tingginya angka pengangguran, rendahnya daya saing KUMKM dan rendahnya kualitas kelembagaan dan usaha KUMKM.** Untuk menjawab isu strategis tersebut langkah yang ditempuh adalah dengan meminimalisir hambatan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama KUMKM, yaitu antara lain : 1) Meningkatkan Daya Saing SDM KUMKM , 2) Meningkatkan Akses KUMKM Terhadap Sumber-Sumber Permodalan/Pembiayaan, 3) Meningkatkan Akses KUMKM Terhadap Pemasaran dan Daya Saing Produk, 4) Meningkatkan Akses KUMKM Terhadap Pemanfaatan IT / Informasi Teknologi, 5) Meningkatkan Akses SDM Terhadap Sumber-Sumber Produktif Lainnya.

Kebijakan yang ditempuh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu : 1) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM, 2) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah, 3) Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Mikro Kecil Menengah, 3) Penciptaan Iklim Usaha-usaha Mikro Kecil Menengah Yang Kondusif, serta 4) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM.

Dengan arah kebijakannya antara lain peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber permodalan dengan kebijakan umum mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat perdesaan dalam hal ini kedudukan Koperasi dapat berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dianggap memiliki peran strategis dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan dapat menekan angka kemiskinan begitu pula dengan penumbuhan Wirausaha Baru diharapkan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat. Fasilitasi akses permodalan terhadap lembaga keuangan mikro dalam hal ini koperasi dari Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) yang dapat berfungsi sebagai channelling kepada pinjaman produktif anggota koperasi terus ditingkatkan dalam rangka menguatkan peran koperasi di masyarakat. Upaya lain dalam meningkatkan akses permodalan bagi KUMKM yaitu mendorong pemanfaatan dana-dana kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kredit Usaha Rakyat, serta akses modal kerja bagi wirausaha baik melalui anggaran APBD maupun APBN.

Pengembangan akses pasar juga masih sangat dibutuhkan oleh KUMKM melalui peningkatan kualitas dan daya saing produk dan fasilitasi promosi dan pemasaran KUMKM serta dengan mendekatkan akses KUMKM terhadap Informasi Teknologi dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015, peningkatan akses KUMKM terhadap sumber-sumber daya produktif juga terus ditingkatkan melalui antara lain fasilitasi sarana dan prasarana ekonomi baik dari daerah maupun pusat antara lain revitalisasi pasar tradisional, penataan lapak Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) , UKM Mart, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM dan sarana promosi diwilayah

strategis serta pelaksanaan program-program kemitraan. Peningkatan daya saing SDM KUMKM terus pula didukung, hal ini ditempuh baik melalui diklat dan bintek maupun magang dalam rangka peningkatan wawasan SDM KUMKM.

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2015 menunjukkan hasil yang meningkat. Hal ini ditandai beberapa indikator, yaitu : meningkatnya kualifikasi Koperasi Berkualitas, meningkatnya kelembagaan koperasi yang meliputi jumlah koperasi, anggota dan pengurus maupun kegiatan usaha yang ditangani oleh koperasi, meningkatnya jumlah kelembagaan KSP/USP Koperasi baik konvensional dan syariah, jumlah anggota yang dilayani oleh KSP/USP, meningkatnya kualifikasi usaha UMKM, meningkatnya kualitas dan kegiatan usaha sentra dan UKM binaan, termasuk didalamnya tumbuhnya wirausaha-wirausaha baru, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan jajaran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memberikan Kewenangan yang besar kepada Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sangat mendukung dalam pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pemerintah Daerah dapat mengetahui secara pasti permasalahan pelaku ekonomi di wilayahnya dan diharapkan dapat mampu merumuskan kebijakan yang tepat untuk memberdayakan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sehingga dapat menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan dukungan perkuatan bagi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Makin besar Dana APBD dan Dekonsentrasi diharapkan akan lebih mampu memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di wilayah kerjanya untuk dapat berperan sebagai motor penggerak perekonomian daerah.

Strategi utama pembangunan ekonomi Daerah Nusa Tenggara Barat adalah pemberdayaan ekonomi dan pengembangan dunia usaha, yang merupakan pola untuk Pembangunan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah secara terarah dan terpadu. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibentuk berdasarkan pasal 27 PERDA Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 7 Tahun 2008 memiliki tugas pokok pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan, adapun Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor: 07 Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008, Tentang Organisasi dan tata kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan

Menengah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi NTB mempunyai **Tugas Pokok membantu Gubernur dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tugas Pembantuan dan Tugas Dekonsentrasi.**

Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Dinas Koperasi UMKM mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2. Perencanaan Program dan Kegiatan bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, keuangan, umum dan kehumasan serta Pengesahan Pengadministrasian badan hukum koperasi dan konsultasi hukum koperasi
3. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, pengelolaan data dan informasi di bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam.
4. Penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan di bidang koperasi, pengusaha mikro kecil dan menengah.
5. Penyusunan rumusan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan di bidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam.

### C. **Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 7 Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008 terdiri dari : ***(Struktur Organisasi Terlampir pada lampiran 9)***

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pembinaan Koperasi :
  - a. Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi
  - b. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi
  - c. Seksi Pemberdayaan Koperasi.
4. Bidang pemberdayaan Usaha Usaha Mikro Kecil Menengah :
  - a. Seksi Pemasaran dan Jaringan UMKM
  - b. Seksi Sarana dan Sertifikasi UMKM
  - c. Seksi Pemberdayaan UMKM
5. Bidang Fasilitasi Permodalan dan Simpan Pinjam :
  - a. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan Simpan Pinjam
  - b. Seksi Pemberdayaan Simpan Pinjam

- c. Seksi Pengawasan dan Penilaian Simpan Pinjam
6. Bidang Penyuluhan Koperasi dan UMKM :
  - a. Seksi Penyuluhan Koperasi
  - b. Seksi Penyuluhan UMKM
  - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - a. Widyaiswara
  - b. Perencana
  - c. Arsiparis
  - d. Pustakawan
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :
  - a. Kepala Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi UMKM
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM
  - d. Seksi Monitoring dan Evaluasi Diklat

#### D. Personalia

Jumlah PNS di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi NTB Tahun 2015 kondisi per 31 Desember 2015 sebanyak 81 orang. Jumlah tersebut berkurang sebanyak 6 orang (6,8%) dibanding tahun 2014 sebanyak 87 orang. Disamping itu juga terdapat pegawai tidak tetap (honorar daerah) sebanyak 1 orang. Sehingga total jumlah PNS dan PTT sebanyak 82 orang.

#### Rincian jumlah pegawai berdasarkan Eselon adalah sbb:

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 6 orang
- Eselon IV : 18 orang
- Pejabat Fungsional : 5 orang
- Pegawai Non Struktural : 51 orang
- PTT : 1 orang

#### Rincian jumlah pegawai berdasarkan Golongan sbb:

No	Pangkat/Gol.	Jabatan			Total
		Struktural	Fungsional	Staf	
1.	IV/d	-	1	-	1
2.	IV/c	1	-	1	2
3.	IV/b	3	-	1	4
4.	IV/a	5	2	-	7
5.	III/d	16	1	11	28
6.	III/c	-	-	5	5
7.	III/b	-	1	12	13
8.	III/a	-	-	2	2

9.	II/d	-	-	-	-
10.	II/c	-	-	4	4
11.	II/b	-	-	11	11
12.	II/a	-	-	2	2
13.	I/d	-	-	-	-
14.	I/c	-	-	2	2
15.	I/b	-	-	-	-
16.	I/a	-	-	-	-
	Jumlah	25	5	51	81

**Rincian jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Jabatan				Total
		Struktural	Fungsional	Staf	PTT	
1.	S.2	5	2	2	-	9
2.	S.1	20	2	23	1	46
3.	S.M/D.III	-	1	2	-	3
4.	SLTA	-	-	22	-	22
5.	SLTP	-	-	1	-	1
6.	SD	-	-	1	-	3
	Jumlah	25	5	51	1	82

**Rincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Kelamin	Jabatan				Total
		Struktural	Fungsional	Staf	PTT	
1.	Laki-Laki	12	5	37	-	53
2.	Perempuan	13	2	18	1	35
	Jumlah	25	7	55	1	88

**Penyebaran Pegawai pada masing-masing Bagian/ Subdin**

No.	U R A I A N	Keadaan 31-12-2014	Keadaan 31-12-2015	Keterangan
1.	Kepala Dinas/ Sekretariat + PTT	32	30	
2.	Bidang Pembinaan Koperasi	11	8	
3.	Bidang FPSP	10	11	
4.	Bidang Pemberdayaan UMKM	10	9	
5.	Bidang Penyuluhan Kop. UMKM	7	9	
6.	Balai Diklat Koperasi UMKM	18	15	
	Jumlah	88	82	-6

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015**

##### **1. Tujuan Dan Sasaran**

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan, agar lebih konkrit Visi dan Misi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah menjabarkannya kedalam pernyataan tujuan, sasaran dan kegiatan – kegiatan strategis yang harus dilakukan dalam Rencana Kerja Tahunan. Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

##### **a. Tujuan**

##### **1) Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Tangguh, Unggul, Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing Yang Dikelola Secara Profesional dan Ditopang Oleh Kegiatan usaha anggota dan UMKM.**

##### **Tangguh**

Koperasi UMKM yang mempunyai semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan yang baik untuk dapat mendirikan, memiliki dan menangani perusahaan yang risikonya cukup besar serta kegiatan usahanya cukup kompleks.

##### **Unggul**

Koperasi UMKM yang mempunyai kemampuan untuk berdaya saing secara wajar, lebih baik dan benar dalam berwirausaha dengan pihak pelaku-pelaku usaha lainnya.

##### **Produktif**

Koperasi UMKM yang mampu mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi (sumber daya manusia dan sumber daya alam) secara efektif dan efisien.

##### **Mandiri**

Koperasi UMKM yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri.

##### **Berdaya Saing**

Koperasi UMKM yang memiliki kemampuan dalam menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif dan mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi.



## **2) Meningkatkan Akses Dan Pangsa Pasar Koperasi dan UMKM**

Meningkatkan Peran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Perekonomian Daerah dan Nasional dimana kebijakan pembangunan perekonomian daerah perlu memprioritaskan peran koperasi UMKM sebagai motor penggerak roda perekonomian daerah dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan Koperasi UMKM, antara lain melalui: penyederhanaan perijinan, peningkatan layanan publik, meningkatkan akses KUMKM pada berbagai bidang usaha.

## **3) Terwujudnya Koperasi dan UMKM Sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan**

Dalam rangka mengembangkan sistim ekonomi kerakyatan, harus bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.

## **4) Meningkatkan Pelayanan Koperasi**

Meningkatkan Kemampuan Koperasi dalam Memberikan Pelayanan Kepada Anggota dan Masyarakat, kegiatan usaha koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang kegiatan usaha para anggotanya maupun meningkatkan kesejahteraanya. Dalam hal ini maka pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien dalam arti koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh keuntungan.

### **b. Sasaran**

Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang di fokuskan untuk mencapai keempat tujuan diatas sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode 2013 – 2018 untuk Tahun 2015 sebagai berikut : Tujuan berikut sasarannya adalah sebagai berikut :

#### **1) Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang tangguh, unggul, produktif, mandiri dan berdaya saing yang dikelola secara Profesional.**

Sasaran yang ditetapkan untuk Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang tangguh, unggul, produktif, mandiri dan berdaya saing dengan Indikator Sasaran dan Target Kinerja sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualifikasi Koperasi yang berkualitas 200 Koperasi.
- b. Meningkatnya pelaksanaan RAT sebanyak 60 % .
- c. Meningkatnya jumlah KSP sebanyak 10 KSP
- d. Meningkatnya Jmlah KSP Syariah 169 KSPS
- e. Meningkatnya kesehatan KSP/USP Koperasi sebanyak 1.255 KSP/USP Koperasi.

**2) Meningkatnya akses pasar dan pangsa pasar Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.**

Sasaran Yang ditetapkan untuk Meningkatnya akses pasar dan pangsa pasar Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan Indikator Sasaran dan Target Kinerja sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Modal Sendiri Koperasi sebanyak Rp. 785.376 juta
- b. Meningkatnya Volume Usaha Koperasi sebesar Rp. 1.574.065 juta
- c. Meningkatnya SHU Koperasi sebesar Rp. 109.802,91 juta
- d. Meningkatnya Kualifikasi Usaha Mikro sebanyak 442 unit
- e. Meningkatnya Wirausaha Baru sebanyak 1.000 unit.
- f. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sentra sebanyak 10 Sentra.

**3) Terwujudnya Koperasi dan UMKM sebagai lembaga ekonomi kerakyatan.**

Sasaran yang ditetapkan untuk Terwujudnya Koperasi dan UMKM Sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan, dengan Indikator Sasaran dan Target Kinerja sebagai berikut:

- a. Meningkatnya jumlah Koperasi sebanyak 75 Koperasi
- b. Meningkatnya jumlah pengelola Koperasi sebanyak 450 orang

**4) Meningkatnya Pelayanan Koperasi.**

Sasaran yang ditetapkan untuk Meningkatkan Pelayanan Koperasi, dengan Indikator Sasaran dan Target Kinerja sebagai berikut :

- a. Meningkatnya jumlah anggota Koperasi sebanyak 1.500 orang
- b. Meningkatnya jumlah kualitas SDM KUMKM sebanyak 15 Akt / 450 orang

**2. Cara mencapai Tujuan dan Sasaran.**

Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dijabarkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pemberdayaan Koperasi UMKM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
- b. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah
- c. Menciptakan Iklim Usaha UMKM Yang Kondusif Bagi Pengembangan Koperasi UMKM
- d. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM

Sedangkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah
6. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif.
7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Penetapan Kinerja, maka kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat selama Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

**TUJUAN I : Terwujudnya Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) yang tangguh, unggul, produktif, mandiri dan berdaya saing yang dikelola secara Profesional.**

**SASARAN : Meningkatnya Kualifikasi Koperasi Berkualitas; Meningkatnya Pelaksanaan RAT, Meningkatnya Jumlah KSP; Meningkatnya Jumlah KSP Syariah; Meningkatnya Kesehatan KSP/USP.**

Sasaran ini dicapai melalui 1 Program 2 kegiatan, yaitu :

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan 3 Kegiatan, yaitu :
  - a. Pembinaan; Pengawasan; dan Penghargaan Koperasi Berprestasi, melalui :
    - Koordinasi Fasilitasi Pengembangan Koperasi di Wilayah OVOP
    - Pembinaan Kelembagaan Dalam Rangka Percepatan RAT Koperasi di Provinsi dan 10 Kabupaten/Kota
    - Temu Konsultasi PPKL (Petugas Penyuluh Konsultasi Lapangan) dengan Kab/Kota di Provinsi
    - Cetak Buku Pedoman dalam rangka mendukung kegiatan sosialisasi yaitu Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (ADRT) Koperasi; Pedoman Hak dan Tanggung Jawab Anggota Koperasi; Pedoman Peningkatan Peran dan Fungsi Perangkat Organisasi Koperasi.
    - Verifikasi Koperasi Berprestasi Dan Koperasi Sekolah Berprestasi
    - Peningkatan Kualifikasi Kualitas Koperasi melalui :
      - Pemeringkatan 100 Koperasi
      - Pelaksanaan Bantuan Biaya Audit kepada 30 Koperasi

- Pemberian Penghargaan Kepada Koperasi Berprestasi (4 Koperasi) dan Koperasi Sekolah Berprestasi (4 Koperasi)
- b. Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/Manajemen Modern Pada Jenis Usaha koperasi, melalui :
- Rapat Kelembagaan Koperasi / KSP / USP Koperasi dengan Kabupaten Kota se NTB
  - Bimbingan Teknis Standar Operasionalisasi Manajemen (SOM) Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
  - Rapat Koordinasi Pemberdayaan Koppontren Melalui KSP/USP Pola Syariah di Provinsi
  - Rapat Koordinasi Pelaksanaan SHAT Bagi Pelaku dan Gerakan Koperasi dan UMKM
  - Peningkatan Kapasitas KSP/USP Syariah ke Luar Daerah
  - Fasilitasi Pembentukan /Penyesuaian Anggaran Dasar Koperasi menjadi Koperasi Berbasis Syariah 100 Koperasi
  - Evaluasi Pemanfaatan Software Akuntansi Syariah Ke 10 Kab/kota

**TUJUAN 2 : MENINGKATNYA AKSES DAN PANGSA PASAR KOPERASI DAN UMKM**

**SASARAN : Meningkatkan Modal Sendiri Koperasi, Meningkatkan Volume Usaha Koperasi, Meningkatkan SHU Koperasi, Meningkatkan Kualifikasi Usaha UMKM**

Sasaran ini dicapai melalui 3 Program 7 kegiatan, yaitu :

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan 1 Kegiatan, yaitu :
  - a. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi, melalui :
    - Workshop Pengembangan Usaha Koperasi di Sektor Riil
    - Pengembangan Koperasi Yang mendukung pariwisata
    - Rapat Revitalisasi Koperasi
    - Dukungan Hari Pangan Sedunia dan HKG
    - BinteK Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Penghasil Tembakau Pra Koperasi
    - Verifikasi dan Evaluasi Dana Bergulir/Hibah
    - Penyelenggaraan Pasar Rakyat Dalam Rangka Hari Pangan Sedunia dan Hari Koperasi
2. Program Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah , melalui kegiatan 4 kegiatan, yaitu:
  - a. Pengembangan Klaster Bisnis, melalui :
    - Temu Konsultasi Pengembangan Sentra Tenun Se P- Lombok
    - Validasi Data Sentra dan BDS ke Kabupaten/Kota Se- NTB

- b. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, melalui :

Kegiatan Pasar Rakyat sebanyak 7 kegiatan yang dilaksanakan di:

- Se-Pulau Lombok dalam rangka HUT NTB
- Mataram dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke 70 Tahun 2015
- Se-Pulau Lombok dalam rangka HUT KORPRI ke 57 Tahun 2015
- Lombok Tengah dalam rangka HUT RI KE 70 Tahun 2015
- Mataram dalam rangka Bulan Suci Ramadhan 1437 H
- Lombok Barat dalam rangka Tahun Baru Islam
- Lombok Timur dalam rangka Idul Adha 1437

- c. Penyelenggaraan Industri Rumah Tangga; Industri Kecil dan Industri Menengah, melalui :

- Bimbingan Teknis PIRT 200 UMK di 10 Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Sertifikasi Label Halal/Legal Aspek 45 UMKM
- Pembinaan Kelompok Ekonomis Produktif di 10 Kab/Kota

- d. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, melalui :

- NTB Expo – Mataram ( 10 stand )
- Pameran HUT NTB (2 Stand )
- Harkopnas Expo – NTT ( 1 Stand )
- Yogya Trade Expo – Yogyakarta ( 2 Stand )
- Pameran Tourism Trade Expo 2015 - Manado (2 stand )

3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha UKM, dengan 2 kegiatan yaitu :

- a. Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi Dan Bisnis, melalui :

- Bintek Tenun di Kota Bima, 30 Orang
- Bintek Pembuatan Bakso di Mataram, 60 Org
- Bintek Pembuatan Emping Jagung di Kabupaten Sumbawa, 60 Orang
- Bintek Pembuatan Dodol Rumput Laut di Lombok Barat 60 Org
- Bintek Pembuatan Abon Ikan di Kabupaten Lombok Utara 60 Org
- Bintek Handycraft dan Modifikasi Kain Tenun, 40 Orang
- Bintek Pengolahan Makanan Berbahan Dasar Ikan di Kab. Lombok Utara, 60 Orang
- Bintek Pengolahan Kacang Mente di Kabupaten Lombok Utara, 60 Org
- Bintek Ketak di Kab. Lombok Barat dan Kab. Lombok Tengah, 60 Orang
- Bintek Kerajinan Batok Kelapa di Kabupaten Lombok Utara, 60 Orang
- Bintek Pengolahan Cabe di Kabupaten Lombok Tengah, 60 Orang
- Bintek Pengolahan Rumput Laut di Kabupaten Lombok Timur, 60 Org

- Bintel Pengolahan Makanan Unggulan Daerah (Kerake) di Kabupaten Lombok Timur, 60 Orang
- Fasilitas Peralatan Pasca Bintel :
  - Peralatan Tenun 6 Paket
  - Peralatan Pembuatan Bakso 15 Paket
  - Peralatan Pembuatan Emping Jagung 12 Paket
  - Peralatan Pembuatan Dodol Rumpit Laut 10 Paket
  - Peralatan Pembuatan Abon Ikan 12 Paket
  - Peralatan Mekanisasi Pembuatan Tas/Sepatu Berbahan Dasar Batik/Tenun 24 Unit
  - Peralatan Pengolahan Ikan 12 Paket
  - Peralatan Pengolahan Kacang Mente 12 Paket
  - Peralatan Pengolahan Batok Kelapa 10 Paket
  - Peralatan Pengolahan Cabe 12 Paket
  - Peralatan Pengolahan Rumpit Laut 12 Paket
  - Peralatan Pengolahan Ketak 12 Paket
  - Peralatan Pengolahan Makanan Unggulan Daerah (kerake) 10 Paket
- Pengadaan Gerobak Usaha Bagi Wirausaha Baru 135 Unit
- Fasilitas Sarana Usaha Pengusaha Kreatif Lapangan (Lapak PKL) di Kabupaten Lombok Timur 15 unit, Kabupaten Lombok Utara 15 unit, Kabupaten Lombok Barat 15 unit
- Pengadaan Software Decision Support System (DSS) untuk penyusunan Study kelayakan usaha bagi UMKM
- Pengadaan Peralatan Bagi Wirausaha Baru Pasca Diklat
  - Peralatan Otomotif 10 Paket
  - Peralatan Konveksi 10 Paket
  - Peralatan Tata Boga 10 Paket

**TUJUAN 3 : TERWUJUDNYA KOPERASI DAN UMKM SEBAGAI LEMBAGA EKONOMI KERAKYATAN**

**SASARAN : Meningkatnya Jumlah Koperasi dan Meningkatnya Jumlah Pengelola Koperasi**

Sasaran ini dicapai melalui 1 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan 1 kegiatan , yaitu :

a. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/UKM, melalui :

- Diklat Mgt Perkoperasian Bagi Pengurus/Pengelola Koperasi (2 AKT, 60 Org)

**TUJUAN 4 : MENINGKATNYA PELAYANAN KOPERASI**

**SASARAN : Meningkatkan Jumlah Anggota Koperasi dan Meningkatkan Jumlah Kualitas SDM**

Sasaran ini dicapai melalui 2 Program dan 2 Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan 1 Kegiatan, yaitu :

a. Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi, melalui :

- Pemberian Bimbingan Teknis Perkoperasian kepada PPKL dan PPL
- Sosialisasi Jasa Keuangan Syariah kepada anggota / masyarakat di 10 Kabupaten / Kota
- Sosialisasi PP 17 Tahun 2013 tentang Penjelasan UU No. 28 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah
- Sosialisasi Perpres 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha UMK
- Pelaksanaan Orasi dan Simulasi Perkoperasian dalam rangka Peringatan Hari Koperasi Nasional
- Pemberian penghargaan kegiatan cerdas cermat perkoperasian , orasi dan simulasi perkoperasian.
- Publikasi Paket Khusus Perkoperasian dan UKM dan Paket Promosi Produk Unggula KUMKM
- Publikasi KUMKM melalui Cetak Leaflet dan brosur, Kalender dan foto-foto kegiatan

2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan 1 kegiatan , yaitu :

a. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/UKM, melalui :

- Diklat Akuntansi Komputer Bagi Pengurus/Pengelola Koperasi (2 AKT, 60 Orang)
- Diklat Akuntansi Sederhana Bagi UKM Komputer (2 AKT, 60 org)
- Diklat Study Kelayakan Program DSS (2 AKT, 60 Org)
- Diklat Penilaian Kesehatan Bagi Pengurus /Pengelola Koperasi (2 AKT, 60 Org)
- Diklat Pengawasan dan akuntabilitas Bagi Pengurus/Pengelola Koperasi (2 AKT, 60 Org)
- Diklat Penilaian Kesehatan bagi Koperasi Bagi PPKL dan Konsultan PLUT (1 AKT, 30 Orang)
- Diklat Pengelolaan KSP/USP Koperasi Pola Syariah (2 AKT, 60 Org).
- Diklat Manajemen Usaha Kecil (MUK) Bagi WUB Di Bidang Otomotif, Tata Boga, Dan Konveksi (6 Akt, 160 Orang)
- Diklat Pemeringkatan Koperasi Bagi PPKL dan Konsultan PLUT (1 AKT, 30 Orang)
- Diklat Manajemen Pemasaran Hasil Prduksi Tembakau Bagi Petani/Anggota Koperasi Penghasil Tembakau (2 AKT, 60 orang)

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja organisasi digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan.

Pengukuran Capaian Kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran Instansi Pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada hasil pengukuran kinerja kegiatan. Hasil pengukuran kinerja kegiatan tersebut dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Tahunan PKT yang merujuk kepada indikator-indikator kegiatan yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat.

##### **1. Evaluasi Kinerja**

Berdasarkan hasil perhitungan Pengukuran Kinerja Tahunan (PKT), dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah melakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tujuan I : Terwujudnya Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) yang tangguh, unggul, produktif, mandiri dan berdaya saing yang dikelola secara Profesional dan ditopang oleh kegiatan Usaha anggota dan UMKM.**

Sasaran yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan tersebut, dapat dilihat pada **Indikator Keberhasilan** pencapaian sasaran sebagai berikut :



1. Meningkatnya Kualifikasi Koperasi yang berkualitas sebanyak 200 Koperasi, dengan tingkat pencapaian kualifikasi Sangat Berkualitas 3 Koperasi, Berkualitas 132 Koperasi dan Cukup Berkualitas 63 Koperasi dengan jumlah total 198 Koperasi atau 99 %.  
**(Merupakan Indikator Kinerja Utama / IKU)**
2. Meningkatnya pelaksanaan RAT sebanyak 56 % dari jumlah Koperasi. Realisasi Pelaksanaan RAT mencapai 54,36 % .
3. Meningkatnya jumlah KSP/USP Koperasi, sebanyak 10 Koperasi. Realisasi peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi mencapai 41 Koperasi atau 410 % dari Target yang ditetapkan.
4. Terbentuknya Koperasi Syariah sebanyak 36 KSPS dari target 169 KSPS dari target yang ditetapkan sebesar 21,30 %. **(Merupakan Indikator Kinerja Utama / IKU)**
5. Klasifikasi KSP/USP Koperasi yang dinilai pada tahun 2015 yaitu sebanyak 414 Koperasi atau 32,99 % dibanding jumlah KSP/USP yang telah dinilai Kesehatannya pada Tahun 2014 sebanyak 555 KSP/USP atau 44,22 % dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 1.255 Koperasi.

Adapun hasil Penilaian Kesehatan pada Tahun 2015 sebagai berikut :

- 68 KSP/USP dengan kategori sehat
- 325 KSP/USP dengan kategori cukup sehat
- 21 KSP/USP Kurang Sehat

## **Tujuan II : Meningkatnya Akses dan Pangsa Pasar Koperasi dan UMKM.**

Sasaran yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan tersebut, dapat dilihat pada indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :

- 1) Realisasi peningkatan Modal Sendiri Koperasi sebesar Rp. 810,16 milyar atau 103,16 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 785,376 milyar
- 2) Realisasi peningkatan Volume Usaha Koperasi sebesar Rp. 1, 507 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1,574 triliun atau 95,751% dari target.
- 3) Realisasi peningkatan SHU Koperasi sebesar Rp. 82,775 milyar dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 109,803 milyar atau 75,39 % dari target.
- 4) Meningkatnya kualifikasi UMKM binaan sebanyak 442 unit dengan tingkat Realisasi sebanyak 830 unit atau 187,78 % dari target, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Usaha Kecil menjadi Usaha Menengah 4 unit (200 % ) dari target 2 unit
  - b. Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil 45 (112,5 % ) dari target 40 unit
  - c. Usaha Mikro 730 unit ( 182,5 % ) dari target 400 unit. **(Merupakan Indikator Kinerja Utama / IKU)**
- 5) Menumbuhkan Wirausaha Baru sebanyak 1.000 unit dengan tingkat Realisasi sebanyak 1.080 unit atau 108 % dari target. **(Merupakan Indikator Kinerja Utama / IKU)**
- 6) Meningkatnya Manajemen Dan Usaha Sentra sebanyak 10 Sentra dari dari target 10 Sentra yang ditetapkan atau 100 % dari target. **(Merupakan Indikator Kinerja Utama / IKU)**

**Tujuan III : Terwujudnya Koperasi dan UMKM sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan.**

Sasaran yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan tersebut, dapat dilihat pada indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :

- 1) Realisasi peningkatan jumlah Koperasi sebanyak 83 Koperasi dari target 75 Koperasi atau 110,67 % dari target.
- 2) Realisasi peningkatan jumlah Pengelola koperasi sebanyak 235 orang dari target 450 orang atau 52,23 % dari target.

**Tujuan IV : Meningkatnya Pelayanan Koperasi.**

Sasaran yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan tersebut, dapat dilihat pada indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :

1. Realisasi jumlah Anggota Koperasi sebanyak Tahun 2015 sebanyak 623.348 orang menurun 2.769 orang dibanding Tahun 2014 yaitu sebanyak 626.117 orang , atau tidak memenuhi target peningkatan sebanyak 1.500 orang hal ini disebabkan karena penataan kelembagaan koperasi (penghapusan/penggabungan/peleburan Koperasi) untuk diberikan Nomor Induk Koperasi (NIK) yang diumumkan pada Lembar Berita Negara.
2. Meningkatnya jumlah kualitas SDM KUMKM sebanyak 450 orang tingkat pencapaian Realisasi sebanyak 660 orang atau 146,67 % dari target.

**2. Analisis Akuntabilitas Kinerja**

**2.1. Perbandingan Kinerja Dengan Tahun 2014**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tersebut diatas, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Tahun 2015 bila dibandingkan dengan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

**1) Perkembangan Koperasi**

Perkembangan Koperasi baik kelembagaan maupun kegiatan usaha mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan beberapa indikator sbb:

- a. Jumlah Koperasi pada tahun 2014 sebanyak 3.966 unit, meningkat 83 unit atau 2,09 % pada tahun 2015 yaitu 4.049 unit.
- b. Jumlah anggota koperasi pada tahun 2014 sebanyak 626.117 orang, mengalami penurunan sebanyak 2.769 orang atau ( 0,44 % ) pada tahun 2015 yaitu sebanyak 623.348 orang.
- c. Jumlah tenaga kerja (Pengurus, Pengawas, Manajer dan Karyawan) yang dapat diserap oleh Koperasi Tahun 2014 sebanyak 31.337 orang mengalami kenaikan sebanyak 235 orang (0,75 %) pada Tahun 2015 yaitu sebanyak 31.572 orang.

- d. Jumlah Modal Sendiri yang dimiliki koperasi pada tahun 2014 sebesar Rp. 770,35 milyar meningkat Rp. 39,81 milyar atau 5,178 % pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 810,16 milyar.
- e. Jumlah volume usaha koperasi pada tahun 2014 sebesar Rp.1,511 triliun, menurun Rp. 3,66 milyar atau ( 0,24 %) dibanding pada tahun 2015 sebesar Rp. 1,507 milyar . SHU yang diperoleh pada tahun 2014 sebesar Rp. 74,410 milyar meningkat 8,365 milyar atau 11,24 % pada tahun 2015 sebesar Rp. 82,775 milyar.
- f. Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun 2014 sebanyak 184 Koperasi atau 92 % dari target sebanyak 200 Koperasi dengan rincian (Sangat Berkualitas 6 Koperasi, Berkualitas 154 Koperasi dan Cukup Berkualitas 24 Koperasi) dibandingkan tahun 2015 realisasinya sebanyak 198 dari target 200 koperasi atau 99% dengan rincian (Sangat Berkualitas 3 kop, Berkualitas 184 Koperasi, Cukup Berkualitas 184 Koperasi)

## **2) Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah**

Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2014 menunjukkan hasil secara riil sebagai berikut :

- a. Realisasi jumlah WUB yang dibina pada tahun 2014 sebanyak 907 unit atau sebanyak 90,70% dari target sebanyak 1.000 unit. Sedangkan pada tahun 2015 terealisasi sebanyak 1.080 unit dari target 1.000 atau 108 % Sehingga secara kumulatif jumlah WUB yang dibina selama 7 tahun ( kurun waktu 2009 s/d 2015 ) sebanyak 101.181 unit. Hasil ini diperoleh dari realisasi pencapaian Wirausaha Baru pada RPJMD I (2009 s/d 2013) sebanyak 99.194 unit dan RPJMD II tahun ke – 2 (2014 s/d 2015) sebanyak 1.987 unit.
- b. Jumlah Sentra UKM di Provinsi NTB yang dibina Tahun 2014 sebanyak 11 Sentra atau 110 % dari Target sebanyak 10 Sentra. Dan pada Tahun 2015 telah terealisasi pembinaan manajemen dan usaha sentra melalui Koperasi sebanyak 10 sentra dari target 10 sentra atau 100 %.

## **3) Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi**

- a. Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi pada Tahun 2014 sebanyak 2.224 unit, meningkat sebanyak 288 unit atau 11,46 % pada tahun 2015 yaitu sebanyak 2.512 unit.
- b. Jumlah Anggota yang dilayani pada tahun 2014 sebanyak 495.821 orang, menurun sebanyak 52.800 orang atau 11,92 % dibanding pada tahun 2015 yaitu sebanyak 443.021 orang.
- c. Jumlah modal sendiri tahun 2014 sebesar Rp. 457,392 milyar meningkat sebesar Rp. 196,938 milyar atau 43,06 % dibanding pada tahun 2015 sebesar Rp. 654,329 Milyar

- d. Jumlah Volume usaha KSP/USP pada tahun 2014 sebesar Rp. 996,957 milyar meningkat sebesar Rp. 13,977 milyar atau (1,4 %) pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 1,011 trilyun. Sedangkan SHU yang diperoleh tahun 2014 sebesar Rp. 56,903 milyar juga meningkat sebesar Rp. 21,869 milyar atau (27,76 %) dibanding Tahun 2015, yaitu sebesar Rp. 78,772 milyar.
- e. Secara kualitatif tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi yang dinilai Tahun 2014 sebanyak 555 KSP/USP (44 KSP; 507 USP) menunjukkan tingkat kesehatan, sebagai berikut : Kategori Sehat sebanyak 140 unit dan kategori Cukup Sehat sebanyak 396 unit, Kurang Sehat 19 KSP. Dibanding tahun 2015 jumlah KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya sebanyak 414 Koperasi dengan katagori Sehat sebanyak 68 Koperasi berarti mengalami penurunan sebanyak 72 Koperasi atau 51,4 %, cukup sehat sebanyak 325 mengalam penurunan sebanyak 71 Koperasi atau 17,93 %.

Jadi secara keseluruhan jumlah Koperasi Sehat dan Cukup Sehat pada Tahun 2014 sebanyak 536 Koperasi mengalami penurunan. Sebanyak 143 Koperasi atau 26,68 % dibanding Tahun 2015 yaitu sebanyak 393 Koperasi. Hal ini terjadi karena tidak semata-mata hasilnya menurun, hal ini disebabkan karena jumlah koperasi yang dapat dinilai kesehatannya lebih sedikit pada tahun 2015, antara lain disebabkan karena adanya kebijakan penataan kelembagaan Koperasi.

## **2.2. Perbandingan Kinerja Dengan Tahun 2013**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tersebut diatas, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Tahun 2015 bila dibandingkan dengan Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

### **1) Perkembangan Koperasi**

Perkembangan Koperasi baik kelembagaan maupun kegiatan usaha mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan beberapa indikator sbb:

- a. Jumlah Koperasi pada tahun 2013 sebanyak 3.851 unit, meningkat 198 unit atau 5,53 % pada tahun 2015 yaitu 4.049 unit.
- b. Jumlah anggota koperasi pada tahun 2013 sebanyak 624.947 orang, mengalami penurunan sebanyak 1.599 orang atau 0,26 % pada tahun 2015 yaitu 623.348 orang.
- c. Jumlah tenaga kerja (Pengurus, Pengawas, Manajer dan Karyawan) yang dapat diserap oleh Koperasi Tahun 2013 sebanyak 31.241 orang mengalami kenaikan sebanyak 331 orang (1,06 %) pada Tahun 2015 yaitu sebanyak 31.572 orang.
- d. Jumlah Modal Sendiri yang dimiliki koperasi pada tahun 2013 sebesar Rp. 649,071 milyar meningkat Rp. 64,907 milyar atau 10 % pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 810,16 milyar

- e. Jumlah volume usaha koperasi pada tahun 2013 sebesar Rp.1.427.723 juta, meningkat Rp. 119.819 juta atau 8,39 % dibanding pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.547.542 juta. SHU yang diperoleh pada Tahun 2013 sebesar Rp. 60.979 juta meningkat Rp. 21.796 juta atau 35,74 % pada tahun 2015 sebesar Rp. 82.775 juta.
- f. Jumlah Koperasi berkualitas Tahun 2013 merupakan tahun ke-5 pada periode RPJMD I secara kumulatif telah tercapai 2.012 Koperasi dengan target 400 Koperasi pertahunnya hal ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015 karena masuk pada PJMD II, pada RPJMD II ditargetkan peningkatan kualifikasi Koperasi Berkualitas sebanyak 2.000 Koperasi, sampai dengan tahun ke-2 RPJMD II yaitu Tahun 2015 realisasinya sebanyak 198 dari target 200 koperasi atau 99% dengan rincian (Sangat Berkualitas 3 kop, Berkualitas 184 Koperasi, Cukup Berkualitas 184 Koperasi). Namun demikian jika dilihat dari perbandingan pencapaian pada tahun ke-2 pada masing-masing RPJMD. Pada tahun ke-2 RPJMD I telah tercapai 806 koperasi dari target kumulatif 800 Koperasi atau 100,75%, sedangkan pada tahun ke-2 RPJMD II telah dicapai 382 koperasi dari target kumulatif 400 Koperasi atau 95,50 %.

## **2) Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah**

Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015 jika dibandingkan dengan Tahun 2013 menunjukkan hasil secara riil sebagai berikut :

- a. Jumlah WUB yang dibina Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 sebanyak 99.194 unit dari target 100.000 WUB (RPJMD I), Dan pada RPJMD II ditargetkan sebanyak 5.000 unit. Jika dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2015 pada tahun ke-2 (RPJMD II) sebesar 1.987 unit dari target kumulatif 2.000 unit (99,35%) dengan pencapaian WUB tahun ke - 2 pada RPJMD I telah tercapai 28.191 unit dari tareget kumulatif 40.000 unit (70,48 %) artinya terjadi percepatan realisasi.
- b. Jumlah Sentra UKM yang dibina melalui koperasi tahun 2015 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2013 karena merupakan program inovasi.

## **3) Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi**

- a. Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi pada tahun 2013 sebanyak 2.594 unit, menurun sebanyak 82 unit atau 3,16 % pada tahun 2015 yaitu sebanyak 2.512 unit.
- b. Jumlah Anggota yang dilayani pada tahun 2013 sebanyak 563.010 orang, menurun sebanyak 119.989 orang atau 21,31 % dibanding pada tahun 2015 yaitu sebanyak 443.021 orang.
- c. Jumlah modal sendiri tahun 2015 sebesar Rp. 654,329 milyar meningkat sebesar Rp. 79,282 milyar atau 12,12 % dibanding pada tahun 2013 sebesar Rp. 575,047 milyar.

- d. Jumlah Volume usaha KSP/USP pada tahun 2015 sebesar Rp. 1,011 Triliun menurun sebesar Rp. 404 milyar atau (28,55 %) pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 1,415 trilyun. Sedangkan SHU yang diperoleh tahun 2015 sebesar Rp. 78,772 milyar juga menurun sebesar Rp. 16.434 milyar atau (17,26 %) dibanding Tahun 2013, yaitu sebesar Rp. 95,206 milyar.
- e. Secara kualitatif tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi Tahun 2013 menunjukkan tingkat kesehatan yang baik, yaitu kategori Sehat sebanyak 115 unit dan kategori Cukup Sehat sebanyak 471 unit. Dibanding tahun 2015 jumlah KSP/USP sehat sebanyak 68 Koperasi berarti mengalami penurunan sebanyak 47 Koperasi atau 40,86 %, cukup sehat sebanyak 325 Koperasi mengalami penurunan sebanyak 146 Koperasi atau 30,99%.

Jadi secara keseluruhan jumlah Koperasi Sehat dan Cukup Sehat pada Tahun 2015 sebanyak 393 Koperasi mengalami penurunan sebanyak 193 Koperasi atau 32,9 % dibanding Tahun 2013 yaitu sebanyak 586 Koperasi. Penurunan ini bukan semata-mata karena hasilnya menurun, hal ini dikarenakan jumlah kesehatan koperasi yang dapat dinilai lebih sedikit di tahun 2015 antara lain adanya kebijakan penataan kelembagaan kembali jumlah koperasi.

### **2.3. Perbandingan Kinerja Dengan Tahun 2012**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tersebut diatas, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Tahun 2015 bila dibandingkan dengan Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

#### **1) Perkembangan Koperasi**

Perkembangan Koperasi baik kelembagaan maupun kegiatan usaha mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan beberapa indikator sbb:

- a. Jumlah Koperasi pada tahun 2012 sebanyak 3.728 unit, meningkat 321 unit atau 8,61 % pada tahun 2015 yaitu 4.049 unit.
- b. Jumlah anggota koperasi pada tahun 2012 sebanyak 658.795 orang, mengalami penurunan sebanyak 35.447 orang atau 5,38 % pada tahun 2015 yaitu sebanyak 623.348 orang.
- c. Jumlah tenaga kerja (Pengurus, Pengawas, Manajer dan Karyawan) yang dapat diserap oleh Koperasi Tahun 2012 sebanyak 31.543 orang mengalami kenaikan sebanyak 29 orang (0,09%) pada Tahun 2015 yaitu sebanyak 31.572 orang.
- d. Jumlah Modal Sendiri yang dimiliki koperasi pada tahun 2012 sebesar Rp. 595,645 milyar meningkat Rp. 214,52 milyar atau 36,01 % pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 810,160 milyar.
- e. Jumlah volume usaha koperasi pada tahun 2012 sebesar Rp. 1,417 triliun, meningkat Rp. 90 milyar atau 6,35 % dibanding pada tahun 2015 sebesar Rp. 1,507 triliun.

- f. SHU yang diperoleh pada Tahun 2012 sebesar Rp. 57,101,- milyar meningkat Rp. 25,674 milyar atau 44,96 % pada tahun 2015 sebesar Rp. 82,775 milyar.
- g. Jumlah Koperasi berkualitas berkualitas Tahun 2012 masuk pada tahun ke-4 periode RPJMD I secara kumulatif telah tercapai 1.633 Koperasi dengan target 400 Koperasi pertahunnya hal ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015 karena masuk pada RPJMD II tahun ke-2, pada RPJMD II ditargetkan peningkatan kualifikasi Koperasi Berkualitas sebanyak 2.000 Koperasi, sampai dengan tahun ke-2 RPJMD II yaitu Tahun 2015 realisasinya sebanyak 198 dari target 200 koperasi atau 99% dengan rincian (Sangat Berkualitas 3 kop, Berkualitas 184 Koperasi, Cukup Berkualitas 184 Koperasi). Namun demikian jika dilihat dari perbandingan pencapaian pada tahun ke-2 pada masing-masing RPJMD. Pada tahun ke-2 RPJMD I telah tercapai 806 koperasi dari target kumulatif 800 Koperasi atau 100,75%, sedangkan pada tahun ke-2 RPJMD II telah dicapai 382 koperasi dari target kumulatif 400 Koperasi atau 95,50 %.

## **2) Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah**

Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015 jika dibandingkan dengan pencapaiannya pada tahun 2012 menunjukkan hasil secara riil sebagai berikut :

- a. Jumlah WUB pada tahun 2015 merupakan pencapaian target tahun ke-2 RPJMD II, telah tercapai secara kumulatif sebanyak 1.987 unit dengan target pertahunnya 1.000 unit , tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2012 karena perbedaan target yang ditetapkan, pada RPJMD II ditetapkan target WUB sebanyak 5.000 unit, namun demikian dapat dibandingkan dalam pencapaian target ke-2 pada masing-masing RPJMD. Jika dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2015 pada tahun ke-2 (RPJMD II) sebesar 1.987 unit dari target kumulatif 2.000 unit (99,35%) dengan pencapaian WUB tahun ke - 2 pada RPJMD I telah tercapai 28.191 unit dari target kumulatif 40.000 unit (70,48 %) artinya terjadi percepatan realisasi.
- b. Jumlah Sentra UKM di Provinsi NTB yang dibina manajemen dan usahanya Tahun 2015 sebanyak 10 Sentra atau 100 % dari target sebanyak 10 Sentra. Pada Tahun 2012 belum ditetapkan target pembinaan sentra pada Renstra sehingga tidak dapat dibandingkan, namun kegiatan pembinaan kepada sentra tetap dilaksanakan.

## **3) Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi**

- a. Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi pada tahun 2012 sebanyak 2.551 unit, meningkat sebanyak 39 unit atau 1,53 % pada tahun 2015 yaitu sebanyak 2.512 unit.

- b. Jumlah Anggota yang dilayani pada tahun 2015 sebanyak 443.021 orang, menurun sebanyak 80.251 orang atau 15,3 % dibanding pada tahun 2012 yaitu sebanyak 523.272 orang.
- c. Jumlah modal sendiri tahun 2015 sebesar Rp. 654,329 milyar,- meningkat sebesar Rp. 192,30 milyar atau 41,62 % dibanding pada tahun 2012 sebesar Rp. 462,031 milyar,-
- d. Jumlah Volume usaha KSP/USP pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.065.208.726.000,- meningkat sebesar Rp. 389.918.107.000,- atau 36,60 % dari tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 1.455.126.833.000,-
- e. Sedangkan SHU yang diperoleh tahun 2012 sebesar Rp. 50,783 milyar meningkat sebesar Rp. 27,989 milyar atau 55,12 % pada Tahun 2015, yaitu sebesar Rp. 78,772 milyar,-
- f. Secara kualitatif tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi Tahun 2012 menunjukkan tingkat kesehatan yang baik, yaitu kategori Sehat sebanyak 5 koperasi dan kategori Cukup Sehat sebanyak 40 koperasi. Dibanding tahun 2015 jumlah KSP/USP Sehat sebanyak 68 Koperasi Cukup Sehat sebanyak 325 koperasi, artinya mengalami peningkatan pada katagori Sehat maupun Cukup Sehat.

### **3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 Dibanding Target Jangka Menengah (Tahun 2018)**

Pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Tahun 2015 bila dibandingkan dengan target jangka menengah (Tahun 2018) adalah sebagai berikut:

**Tujuan I : Terwujudnya Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) yang tangguh, unggul, produktif, mandiri dan berdaya saing yang dikelola secara Profesional dan ditopang oleh kegiatan Usaha anggota dan UMKM.**

Sasaran yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan tersebut, dapat dilihat pada indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Kualifikasi Koperasi yang berkualitas sebanyak Koperasi, dengan tingkat pencapaian sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 382 Koperasi pada Tahun 2015 jika dibandingkan dengan target pencapaian jangka menengah atau tahun 2018 sebanyak 1.000 maka realisasinya baru mencapai 38,2 %.
- 2) Meningkatnya pelaksanaan RAT tahun 2015 sebanyak 1.241 Koperasi dari jumlah koperasi aktif 2.385 atau 52,03 % , jika dibandingkan target jangka menengah atau tahun 2018 sebesar 70% maka realisasinya sudah mencapai 74,33 %.
- 3) Meningkatnya jumlah KSP/USP Koperasi sampai dengan tahun 2015 sebanyak 44 KSP/USP jika dibandingkan dengan target pencapaian pada jangka menengah atau akhir tahun 2018 sebanyak 50 KSP/USP maka realisasinya mencapai 88 %.



- 4) Terbentuknya Koperasi Syariah secara kumulatif sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 110 KSPS jika dibandingkan dengan target jangka menengah atau akhir tahun 2018 sebanyak 500 Koperasi Syariah maka realisasinya kumulatif sampai dengan tahun 2015 baru mencapai 22 %.
- 5) Meningkatnya kesehatan KSP/USP dengan Klasifikasi KSP/USP Koperasi yang dinilai pada tahun 2015 yaitu sebanyak 414 Koperasi. Adapun hasil Penilaian Kesehatan pada Tahun 2015 sebagai berikut :
  - 68 KSP/USP dengan kategori Sehat
  - 325 KSP/USP dengan kategori Cukup Sehat
  - 21 KSP/USP dengan kategori Kurang SehatJika dibandingkan dengan target jangka menengah atau akhir tahun 2018 untuk KSP/USP yang dapat dinilai sebanyak 1.255 dengan klasifikasi:
  - 135 KSP/USP dengan katagori sehat, maka realisasinya mencapai 50,37 %
  - 988 unit KSP/USP dengan katagori sehat, maka realisasinya baru mencapai 32,89 %.

## **Tujuan II : Meningkatnya Akses dan Pangsa Pasar Koperasi dan UMKM.**

Sasaran yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan tersebut, dapat dilihat pada indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Modal Sendiri Koperasi pada tahun 2015 sebesar Rp. 810.160 juta atau 77,5 % dari target jangka menengah tahun 2018 sebesar Rp.1.045.335 juta.
- 2) Meningkatnya Volume Usaha Koperasi pada tahun 2015 sebesar Rp.1.507.542 juta atau 81,19 % dari target jangka menengah pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.856.885 juta.
- 3) Meningkatnya SHU Koperasi pada tahun 2015 sebesar Rp. 82.775 juta, atau 61,54 % dari target jangka menengah tahun 2018 sebesar Rp. 134.513,29 juta.
- 4) Meningkatnya kualifikasi UMKM secara kumulatif sampai dengan tahun 2015 sebanyak 1.280 unit atau 57,92 % bila dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2018 sebanyak 2.210 unit,dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Usaha Kecil menjadi Usaha Menengah 10 unit (100 % ) dari target 10 unit
  - b. Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil 92 unit (46 % ) dari target 200 unit
  - c. Usaha Mikro 1.177 unit (58,85 % ) dari target 2.000 unit
- 5) Tumbuhnya Wirausaha Baru sebanyak 1.987 unit atau 39,74 % dari target Jangka Menengah Tahun 2018 sebanyak 5.000 unit.
- 6) Meningkatnya Manajemen Dan Usaha Sentra secara kumulatif samapai dengan tahun 2015 sebanyak 24 Sentra dari dari target 50 Sentra pada jangka menengah tahun 2018 atau 48 % dari target.

## **Tujuan III : Terwujudnya Koperasi dan UMKM sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan.**

Sasaran yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan tersebut, dapat dilihat pada indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya jumlah Koperasi sebanyak 198 Koperasi atau 52,8 % dari target jangka menengah tahun 2018 sebanyak 375 koperasi.
- 2) Meningkatnya jumlah Pengelola koperasi sebanyak 952 orang atau 42,31 % dari target jangka menengah Tahun 2018 sebanyak 2.250 orang

**Tujuan IV : Meningkatnya Pelayanan Koperasi.**

Sasaran yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan tersebut, dapat dilihat pada indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya jumlah Anggota Koperasi sebanyak 1.170 pada tahun 2014 kemudian terjadi penurunan pada tahun 2015 sebanyak 2.769 karena penataan kembali kelembagaan koperasi sehingga peningkatannya tidak signifikan atau malah mengalami penurunan sebanyak 1.599 orang atau 21 % dari target jangka menengah tahun 2018 sebanyak 7.500 orang.
- 2) Meningkatnya jumlah kualitas SDM KUMKM secara kumulatif sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 1.320 orang atau 58,67 % dari target jangka menengah tahun 2018 sebanyak 2.250 orang.

**4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi Yang Dilakukan**

**a. Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan Keberhasilan Kinerja**

- 1) Adanya landasan hukum yang kuat terhadap pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- 2) Adanya dukungan Aparatur Pembina Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berdaya saing yang faham akan tugas dan fungsinya dalam mendukung tujuan pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD dan RENSTRA SKPD.
- 3) Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai seperti bangunan gedung kantor bagi pembina Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta bangunan fisik gedung dan sarana usaha bagi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- 4) Adanya dukungan pembiayaan dari Pusat (Kementerian Koperasi dan UKM RI) berupa dukungan perkuatan dan Bantuan Sosial yang meliputi fasilitasi pembiayaan usaha, peningkatan sumber daya manusia dan sarana penunjang usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- 5) Adanya Anggaran APBD dan Dekonsentrasi yang ditunjang oleh Dana Tugas Pembantuan (TP) maupun Dana Alokasi Khusus untuk memberdayakan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

**b. Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Pencapaian Target Kinerja**

- 1) Rendahnya kemampuan dan kualitas rata-rata pembina dalam memberdayakan KUMKM karena kurangnya pengetahuan tentang KUMKM (Diklat dan bintek bagi aparatur tentang perkoperasian dan UMKM sangat terbatas)
- 2) Tingkat profesionalisme aparat pembina dibidang teknis masih terbatas.

- 3) Sarana dan Prasarana penunjang belum memadai
- 4) Dukungan terhadap penciptaan iklim usaha KUMKM belum memadai.
- 5) Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal dalam pembinaan KUMKM.
- 6) Rendahnya kemampuan memfasilitasi terhadap sumber-sumber pembiayaan dan akses yang mendukung Pemberdayaan KUMKM
- 7) Masih rendahnya penguasaan informasi dan teknologi yang mendukung Pemberdayaan KUMKM
- 8) Kurangnya disiplin, kreatifitas dan inovasi aparatur dalam membina KUMKM
- 9) Terhambatnya pengkaderan aparat pembina KUMKM akibat tingginya mobilisasi/ mutasi SDM pembina KUMKM

### **c. Solusi**

Dalam mengantisipasi dan mengoptimalkan pencapaian kinerja yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan kekuatan yang dimiliki berupa :

- 1) Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Pengembangan Koperasi dan adanya kewenangan dalam memproses pemberian Badan Hukum Koperasi merupakan iklim yang kondusif bagi KUMKM untuk terus dan berkembang
- 2) Tersedianya SDM Pembina Koperasi UMKM yang didukung oleh Lembaga/ Satuan Kerja Pemerintah dalam memberdayakan KUMKM serta adanya Lembaga Teknis Daerah (Balai Diklat Koperasi UMKM) merupakan dukungan yang kuat bagi pengembangan SDM KUMKM.
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana serta anggaran pembinaan untuk pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, memperoleh akses terhadap sumber daya produksi.
- 4) Tersedianya informasi teknologi bagi koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, memperoleh akses terhadap informasi global.
- 5) Adanya program penciptaan Wirausaha Baru yang akan membuka lapangan kerja baru, akan mempermudah kesempatan berusaha dan penumbuhan Usaha Mikro menuju Usaha Kecil dan Usaha Menengah
- 6) Terjalannya koordinasi antar Instansi/Dinas pembina dengan dunia usaha, sebagai upaya sinergis dalam menangkap peluang bagi pengembangan KUMKM.
- 7) Adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk memanfaatkan peluang yang ada bagi pengembangan KUMKM di Provinsi NTB.
- 8) Terbentuknya Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LKPD) kepada Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adanya Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang akuntabel, dan sumber-sumber pembiayaan kredit lainnya kepada KUMKM dalam memberikan

dukungan permodalan merupakan motivasi yang besar. Untuk membenahi Kelembagaan dan Usaha KUMKM.

- 9) Meluasnya jaringan usaha KUMKM melalui kemitraan usaha antar pelaku usaha dan stakeholder terkait karena adanya dukungan komitmen dan perhatian yang besar dari pemerintah terhadap Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, melalui peningkatan akses kepada sumber daya produktif.
- 10) Adanya Dasar Hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah) yang mendukung pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, merupakan pedoman dan petunjuk yang jelas.
- 11) Terbentuknya PLUT – KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM) selaku Rumah Sehat Bagi KUMKM yang berperan sebagai mitra dalam memberikan konsultasi, fasilitasi bimbingan dan pendampingan kepada KUMKM.
- 12) Berperannya fungsi BDS (Business Development Service) Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB dalam hal ini Pusat Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil (PPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan terjalinnya kemitraan PPKP dengan Swasta dan BUMN dalam pembinaan KUMKM.

## **6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam mencapai tujuan program dan sasaran pembinaan pada tahun 2015 ditetapkan Perjanjian Kinerja untuk 4 (empat) program sebesar Rp. 13.920.794.800,- yang bersumber pada Anggaran APBD sebanyak 3 (tiga) program sebesar Rp. 8.550.009.800,- dan anggaran Dekonsentrasi sebesar Rp. 5.370.785.000,- . Dalam dokumen anggaran kegiatan mengalami peningkatan pada anggaran APBD maupun anggaran Dekonsentrasi. Untuk Anggaran APBD Penyerapan anggarannya keuangan mencapai 91,69 % dan fisik program dan kegiatan mencapai 99,36 %. Sedangkan anggaran Dekonsentrasi realisasi keuangan dan fisik mencapai 90,39 %. Hal ini terjadi karena adanya penghematan penggunaan sumber daya antara lain pada beberapa akun belanja, yaitu antara lain adanya penghematan belanja hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat karena adanya sisa harga pengadaan yang merupakan penghematan harga, penghematan kegiatan diklat dan bintek-bintek serta kegiatan lainnya yang merupakan penghematan belanja kegiatan. Namun demikian pencapaian realisasi rata-rata kinerjanya adalah sebesar 146,91% dari seluruh indikator keberhasilan.

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM ini juga tidak terlepas dari dukungan mitra Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB yang merupakan sumber daya potensial secara sinergis melakukan pembinaan kepada Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi NTB antara lain keberadaan Pusat Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil yang merupakan Business Development Service (BDS) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah berhasil menjalin kemitraan dengan beberapa perusahaan swasta maupun BUMN dalam membina dan mengembangkan usaha Koperasi dan UMKM. Sehingga keterbatasan anggaran dalam

membina dan mengembangkan KUMKM yang jumlah sangat besar terutama untuk UMKM dengan jumlah 644.708 unit yang berpotensi sebagai kelompok ekonomis strategis yang dapat dikembangkan menjadi pra koperasi sehingga menjadi UMKM anggota Koperasi yang tangguh, unggul dan kompetitif dalam menghadapi perdagangan global Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang awal Januari Tahun 2016 ini dibuka diharapkan dapat diungkit daya saingnya.

## **7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

### **a. Analisis Keberhasilan Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ditetapkan 4 (empat) Program untuk mencapai sasaran strategis, yaitu :

- 1) Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- 2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- 3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- 4) Program Peningkatan Daya Saing UMKM

Keempat Program di atas merupakan daya ungkit dalam memberdayakan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka menunjang Pencapaian Kinerja.

Pada Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah sangat menunjang pencapaian kinerja dalam indikator Menumbuhkan Wirausaha Baru dan Meningkatkan Kualifikasi Usaha Usaha Mikro Kecil Menengah melalui kegiatan Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis dalam bentuk peningkatan keterampilan Wirausaha Baru dan Usaha Mikro Kecil yang berlokasi di 10 Kabupaten/Kota antara lain melalui Bintek Tenun, Bintek Bakso, Bintek Emping Jagung, Bintek Pembuatan Dodol Rumput Laut, Bintek Pembuatan Abon Ikan , Bintek Pengolahan Makanan Berbahan Dasar Ikan, Bintek Pengolahan Kacang Mente, Bintek Ketak, Bintek Pengolahan Cabe, Bintek Pengolahan Rumput Laut dan Bintek Pengolahan Makanan Unggulan Daerah dengan total peserta yang dibintek sebanyak 730 orang, Fasilitas Peralatan WUB dan KUMKM pasca Bintek sebanyak 344 paket, Pemberian software DSS 64 buah , Pembangunan Lapak PKL di Kabupaten Lombok Timur, Kab. Lombok Utara dan Kabupaten Dompu sebanyak 55 unit lapak. Dan Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/UMKM dengan sasaran 660 orang (22 Angkatan).

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, program ini sangat mendukung pencapaian kinerja dalam hal peningkatan akses pasar dan pangsa pasar KUMKM pada indikator peningkatan manajemen dan usaha sentra yang dibina juga kualifikasi usaha UMKM dan penumbuhan wirausaha baru. Program ini saling terkait dan melengkapi antara program yang satu dan lainnya. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan klaster bisnis, pengembangan sarana produk usaha Mikro Kecil Menengah, penyelenggaraan industri rumah tangga, industri kecil dan industri Menengah serta penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, program ini mendukung pencapaian kinerja pada indikator meningkatnya kualifikasi Koperasi Berkualitas, meningkatnya pelaksanaan RAT, meningkatnya jumlah KSP/USP Koperasi, meningkatnya Kesehatan KSP/USP, meningkatnya modal sendiri koperasi, meningkatnya SHU Koperasi, meningkatnya jumlah KSP Syariah, meningkatnya jumlah dan pengelola koperasi, meningkatnya jumlah anggota koperasi dan kualitas SDM KUMKM. Dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi dalam bentuk pengembangan usaha koperasi di sektor riil, sektor pariwisata, revitalisasi koperasi dan penguatan kelembagaan kelompok tani pra koperasi, kegiatan pembinaan, pengawasan, dan penghargaan Koperasi Berprestasi dalam bentuk percepatan Rapat Anggota Tahunan Koperasi (RAT), Pengembangan Koperasi di wilayah One Village One Product (OVOP) hal ini turut mendukung Pengembangan Manajemen dan Usaha Sentra berbasis koperasi, Penguatan Tenaga PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan), Verifikasi dan Penghargaan Kepada Koperasi Berprestasi dan Koperasi Sekolah Berprestasi, Peningkatan dan Audit Koperasi serta pemberian Buku Pedoman tentang Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Pedoman Hak dan Tanggung Jawab Koperasi serta Pedoman Peningkatan Peran dan Perangkat Organisasi Koperasi kepada Koperasi dan Dinas yang membidangi Koperasi Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Barat.

Pada Program Peningkatan Daya Saing UMKM kegiatan difokuskan pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi, pembinaan dan pengembangan UMKM, pembinaan kelembagaan dan pengembangan KSP/USP, Pameran Produk KUMKM, Monitoring dan Pelaporan, Revitalisasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), Pemberdayaan Layanan Pengembangan Bisnis Lembaga Pengembangan Bisnis melalui pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil /IUMK, Pelatihan Bagi SDM KUMKM, Magang Wirausaha, Fasilitasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM dan Penguatan Kelembagaan Koperasi dalam rangka pengembangan, pengendalian dan pengawasan KSP/KSP Syariah dan LKM.

**b. Analisis Kegagalan Program/Kegiatan Yang Tidak Menunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dalam melaksanakan keempat program tersebut untuk mencapai keberhasilan Pernyataan Kinerja tentunya ada kendala-kendala yang sifatnya teknis di lapangan terutama yang menyangkut kondisi di Kabupaten/Kota. Keterbatasan Anggaran pada Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM serta minimnya jumlah SDM di kabupaten/kota karena beragamnya nomenklatur dinas yang membidangi KUMKM sehingga fungsi pembinaan di kabupaten/kota sangat lemah.

Hal ini berdampak kepada kinerja dan pengembangan KUMKM di kabupaten/kota yang akan berdampak kepada relisasi pencapaian pernyataan kinerja, antara lain realisasi hasil dari kinerja kabupaten/kota pada pencapaian program pada indikator pengembangan KSP/USP Pola Syariah dan peningkatan kualifikasi usaha UMKM.

Untuk mengatasi hal tersebut kebijakan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih banyak memfokuskan lokasi kegiatan di Kabupaten/Kota antara lain pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, pemberian peralatan pasca bintek di kabupaten/kota bagi WUB dan KUMKM, dan melaksanakan Diklat Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM dengan peserta dari 10 Kabupaten/Kota .

**B. REALISASI ANGGARAN**

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah tersedianya anggaran yang memadai, baik anggaran pembangunan maupun anggaran penunjang (rutin). Jumlah anggaran Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 33.032.019.600,- terdiri Dana APBD sebesar Rp. 20.698.204.600,- dan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 12.333.815.000,- Jumlah anggaran tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.443.057.100,- atau 24,23 % dibanding dengan Tahun 2014 sebesar Rp. 26.588.962.500,-

**1. Dana APBD**

Jumlah APBD Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 20.698.204.600,- Jumlah anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp. 753.007.100 ,- atau 3,77 % dibanding tahun 2014 sebesar Rp. 19.945.197.500,- Pemanfaatan Dana APBD Tahun 2015 dipergunakan untuk membiayai gaji pegawai, operasional kantor dan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan UKM, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Gaji (Belanja Tidak Langsung) : Rp. 7.253.994.812 ,-
- b. Belanja Operasional dan Pembinaan Koperasi dan UKM (Belanja Langsung) : Rp. 13.444.209.788,-

Realisasi APBD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 18.977.671.103 ,- ( 91,69 %) dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 6.622.865.944 ( 91.30 %) dan Belanja Langsung Rp.12.354.805.159,- (91,90 %), sehingga terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 1.710.533.497,- (8,26 %) disebabkan karena penghematan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyesuaian Gaji dan Tunj. Pegawai sebesar Rp. 456.473.268,-
- b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 99.178.227-
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp. 63.155.574-
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 5.300.300 ,-
- e. Program peningkatan Pelaporan & Capaian Kinerja Rp. 193.352.300,-
- f. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif Rp. 43.535.200 ,-
- g. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM Rp. 387.763.642,-
- h. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Rp. 32.804.900,-
- i. Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Kop Rp. 213.074.500,-

## **2. Dana Dekonsentrasi**

Jumlah Dana Dekonsentrasi Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 12.333.815.000,- jika dibanding tahun 2014 sebesar Rp. 6.643.765.000 meningkat Rp. 5.690.050.000,- atau 85,64 % Dana Dekonsentrasi dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Realisasi Dana Dekonsentrasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 11.148.623.272,- (90,39 %), terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 1.185.191.728,- (9,61 %). Sebagian besar sisa anggaran ini disebabkan karena adanya :

- a. Adanya Kegiatan Pusat yang tidak jadi dilaksanakan antara lain kegiatan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Regional ke -2 dan Rapat Teknis Perencanaan Pusat berupa dukungan transportasi peserta Kadiskop UMKM Se-Nusa Tenggara Barat.
- b. Penghematan biaya pelaksanaan Diklat Dana Fungsi Pendidikan dari akomodasi, konsumsi dan sertifikat peserta serta pendampingan diklat.
- c. Penghematan pada kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Pameran, Kegiatan IUMK, Pemeringkatan Koperasi, Operasionalisasi PLUT, Monev NRB, dan sebagainya.

Pada **Perjanjian Kinerja Tahun 2015**, ditetapkan anggaran sebesar Rp. 13.920.794.800,- , yang tertuang pada 4 (empat) Program , yaitu :

- a. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan anggaran Rp. 5.452.573.500,- dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran terjadi revisi menjadi Rp. 6.631.206.742,- dengan realisasi keuangan



sebesar Rp. 6.243.443.100,- atau 94,15 % dan realisasi fisik 100 % (APBD) hal ini terjadi karena adanya penghematan anggaran.

- b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan anggaran Rp. 1.035.618.500,- dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran terjadi revisi menjadi Rp. 1.090.659.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.057.854.600,- atau 96,99 % dan realisasi fisik 100% (APBD). Hal ini terjadi karena adanya penghematan anggaran.
- c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan anggaran Rp. 2.061.817.800,- dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran terjadi revisi menjadi Rp. 2.238.727.300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.975.112.814,- atau 88,22 % dan relisasi fisik 94,24 % (APBD), hal ini terjadi karena adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada pembentukan Koperasi Syariah dari 169 target KSP/USP Pola Syariah hanya 36 KSP/USP Pola Syariah yang bisa terbentuk melalui penyesuaian anggaran dasarnya, karena belum adanya dukungan sepenuhnya dari kabupaten/kota, kemudian adanya penghematan belanja hibah, rapat, bintek dan monev .
- d. Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan anggaran Rp. 5.370.785.000,- (Dekonsentrasi), dalam pelaksanaan anggaran mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 6.963.030.000,- atau 128,65 % yang berasal dari dana fungsi pendidikan , sehingga total anggaran menjadi Rp. 12.333.815.000,- dengan realisasi sebesar Rp.11.148.623.272,- (90,39%). Hal ini sebagian besar berasal dari adanya penghematan dari beberapa akun belanja dana fungsi pendidikan.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini merupakan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur NTB dan juga berfungsi sebagai pengukuran kinerja bagi seluruh Aparatur di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Laporan Akuntabilitas ini juga memberikan umpan balik yang diperlukan oleh pimpinan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dan program di masa mendatang sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik.

#### **A. Hambatan dan Permasalahan**

Pembinaan yang dilaksanakan pada Tahun 2015 telah membuahkan hasil yang baik sebagaimana dijelaskan pada BAB III. Namun demikian masih dijumpai beberapa kendala dan permasalahan dalam pemberdayaan Koperasi UMKM sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas SDM Koperasi UMKM yang berakibat rendahnya produktivitas Koperasi UMKM.
2. Masih rendahnya akses pasar dan pangsa pasar yang dikuasai oleh Koperasi UMKM.
3. Terbatasnya modal yang dimiliki oleh Koperasi UMKM dan lemahnya akses permodalan Koperasi UMKM ke Perbankan karena tidak tersedianya agunan sebagai persyaratan untuk memperoleh Kredit dari pihak perbankan.
4. Masih lemahnya penguasaan KUMKM terhadap akses Teknologi Informasi dalam pengembangan dan peningkatan jejaring usahanya.

#### **B. Upaya Pemecahan Masalah**

Upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan untuk mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Memberikan dorongan kepada Koperasi untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Hal ini penting karena penilaian Koperasi Berkualitas dilaksanakan terhadap koperasi yang telah melaksanakan RAT dan melaksanakan pembenahan terhadap koperasi tidak aktif melalui fasilitas penggabungan maupun pembubaran koperasi, melalui fasilitasi perubahan anggaran dasar koperasi mencakup pengalihan Badan Hukum (BH) kepada ekonomis produktif pra koperasi.
2. Memfasilitasi kegiatan legal aspek kepada usaha mikro kecil dan koperasi untuk memudahkan dalam mengakses permodalan dan pengembangan usahanya.

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi UMKM melalui berbagai pendidikan dan latihan, sosialisasi dan penyuluhan sehingga mereka mampu mengelola kelembagaan koperasi UMKM dan mampu meningkatkan kegiatan usahanya.
4. Dukungan peralatan usaha bagi Wirausaha Baru paska diklat sebagai langkah memperluas akses pasar bagi Wirausaha Baru yang tergabung dalam koperasi dan Wirausaha baru yang tersebar di seluruh Provinsi NTB.
5. Melaksanakan Pola Kemitraan dengan BUMN melalui kerjasama peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UKM dibidang wirausaha.
6. Meningkatkan profesionalisme Aparat Pembina melalui berbagai pendidikan dan latihan teknis, pelatihan/kursus ketrampilan dan lain-lain sehingga dapat menambah pengetahuan, kemampuan dan wawasan dalam melaksanakan pembinaan terhadap Koperasi UMKM.
7. Meningkatkan permodalan Koperasi UMKM serta meningkatkan akses permodalan ke Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya. Upaya yang dilakukan antara lain memberikan Dukungan Perkuatan berupa bantuan Modal Kerja (pola bergulir maupun dana Hibah) kepada Koperasi UMKM serta memfasilitasi akses permodalan ke Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
8. Untuk meningkatkan akses Koperasi dan UMKM terhadap sumber – sumber Permodalan khususnya dari Lembaga Perbankan, maka telah dilaksanakan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat
9. Memfasilitasi Program Sertifikasi Hak Atas Tanah dan Perijinan untuk UKM sehingga UKM memiliki Agunan yang diperlukan untuk mengajukan kredit ke Perbankan.
10. Meningkatkan akses pasar dan pangsa pasar Koperasi UMKM. Upaya yang dilaksanakan adalah memfasilitasi penyelenggaraan promosi/pameran di berbagai event baik tingkat Lokal, Regional maupun Nasional. Disamping itu juga melaksanakan kegiatan Temu Usaha dan Pasar Rakyat.
11. Memfasilitasi KUKM terhadap program-program dari Kementerian Koperasi antara lain penataan PKL, Pembangunan Pasar Tradisional dan Dukungan Peralatan untuk kegiatan produksi.
12. Melaksanakan koordinasi pembinaan dengan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat dan instansi terkait, Bank, BUMN dan lembaga lainnya.
13. Meningkatkan jumlah anggaran APBD untuk beberapa kegiatan yang tidak ter-cover oleh dana APBN.
14. Melaksanakan kegiatan pembinaan Produk Unggulan Daerah di bidang makanan olahan yang berbahan dasar PIJAR.
15. Memberdayakan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM sebagai klinik kesehatan bagi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

16. Membangun Web Site Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB dalam upaya membangun informasi data KUMKM yang up to date antara lain melalui Layanan Data Center, Pengaduan Publik dan Konsultasi Online, serta Galeri KUMKM Diskopntb Online dalam upaya memasarkan produk-produk unggulan KUMKM Nusa Tenggara Barat.

Demikian Laporan Akuntabilitas ini disusun sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB dan sebagai bahan masukan pada pimpinan untuk mengambil kebijakan dalam pemberdayaan Koperasi UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram, Pebruari 2016

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

**Drs. H. Supran, MM**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19591231 199003 1 077